

**PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT  
PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)**

**Disusun oleh:**  
**Dika Putri Handayani**  
**NIM. 145020301111017**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT  
PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)**

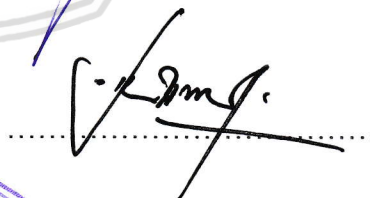
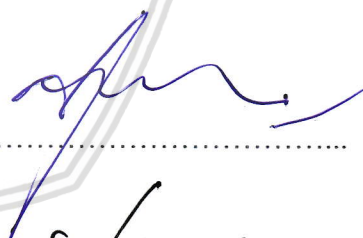
Yang disusun oleh:

Nama : Dika Putri Handayani  
NIM : 145020301111017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

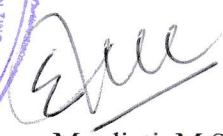
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA  
NIP. 2011068711132001  
(Dosen Pembimbing).
2. Prof. Dr. Sutrisno T., Ak., CA  
NIP. 195604031985031003  
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.  
NIP. 196407091991032007  
(Dosen Penguji II)



Malang, 29 Mei 2018  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

  
Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.  
NIP. 195909021986012001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, PENDIDIKAN,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA  
UMKM DI KOTA MALANG)**

Yang disusun oleh:

Nama : Dika Putri Handayani

NIM : 145020301111017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 2 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA

NIP. 201106871112001

**ABSTRAK****PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT  
PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)**

**Oleh:**  
**Dika Putri Handayani**

**Dosen Pembimbing:**  
**Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial kemasyarakatan, gender, pendidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Malang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosial kemasyarakatan, gender, pendidikan, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau survey. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Partial Least Square melalui SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Sosial Kemasyarakatan, Gender, Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak.

**ABSTRACT****THE EFFECT OF SOCIETY, GENDER, EDUCATION, AND TAX  
PENALTIES ON TAX COMPLIANCE: A CASE STUDY TOWARDS  
MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN MALANG CITY****By:****Dika Putri Handayani****Supervisor:****Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA**

This study aims at examining the effect of society, gender, education, and tax penalties on taxpayers' compliance of MSMEs owners in Malang. The independent variables are the social factor of the society, gender, education, and tax penalties, while the dependent variable is tax compliance. The respondents are 100 tax payers of MSMEs in Malang, who are selected by convenience sampling technique. The primary data of this quantitative study are collected from questionnaires and analyzed using Partial Least Square method by SmartPLS. The result of this study show that the society and tax penalties have positive effect on tax compliance; on the other hand, gender and education don't influence tax compliance.

**Keywords:** Society, Gender, Education, Tax Penalties, and Tax Compliance



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Putri Handayani

NIM : 145020301111017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT  
PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 2 Mei 2018

Pembuat Pernyataan,



Dika Putri Handayani

NIM. 145020301111017

**RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Dika Putri Handayani

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Tempat, Tanggal Lahir** : Lampung Utara, 6 Mei 1997

**Kewarganegaraan** : Indonesia

**Agama** : Islam

**Status** : Belum menikah

**Alamat Asal** : Jalan Lintas Sumatera No 103, Ds Sidoarjo Kec  
Blambangan Umpu, Kab Way Kanan Lampung

**Alamat di Malang** : Jalan Bunga Merak 1 Kavling 11, Malang

**No. HP** : 085368396757

**E-mail** : [dikaputrih@gmail.com](mailto:dikaputrih@gmail.com)

**Pendidikan Formal :**

|                         |             |                                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Sekolah Dasar</b>    | (2002-2008) | : SD Negeri Sidoarjo            |
| <b>SMP</b>              | (2008-2011) | : SMP Negeri 1 Baradatu         |
| <b>SMA</b>              | (2011-2014) | : SMA Al-Kautsar Bandar Lampung |
| <b>Perguruan Tinggi</b> | (2014-2018) | : S1 Akuntansi FEB UB           |

**Pengalaman Non Formal :**

- 2016 Sparkling Ecora
- 2016 Student Conference
- 2015 Sparkling Ecora
- 2015 KM FEB 2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberi nikmat, kesehatan, kelancaran dan juga perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya.
2. Papa Dasar,S.Pd dan Mama Urip Sriwati yang selalu memberikan do’a, semangat, nasihat dan mendukung penuh dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.



4. Prof. Dr. Sutrisno T., Ak., CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lilik Purwanti, M. Si., Ak selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi ini.
6. Sakhara Yudia Pratama yang telah menyemangati peneliti baik dalam keseharian maupun dalam proses penyelesaian skripsi. Thanks for everything.
7. Sahabat terbaik yang selalu menemani saat di Malang, Dwi Rizky, Dayinta Sukma, Ghea Nindya, Dhella Safira, dan Annisa Shinta.
8. Teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini Nadya Septy Dasapradani yang selalu bersama-sama dari awal bimbingan, pergantian dosen pembimbing, hingga ujian skripsi selesai.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR .....                            | i    |
| DAFTAR ISI.....                                 | iii  |
| DAFTAR TABEL.....                               | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                            | ix   |
| ABSTRAK .....                                   | x    |
| ABSTRACT.....                                   | xi   |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                       | 8    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                     | 8    |
| 1.4 Kontribusi Penelitian.....                  | 9    |
| 1.4.1 kontribusi Teoritis .....                 | 9    |
| 1.4.2 Kontribusi Praktis .....                  | 9    |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                     | 10   |
| 2.1 Pengertian Pajak.....                       | 10   |
| 2.2 Fungsi Pajak.....                           | 11   |
| 2.3 Jenis Pajak.....                            | 12   |
| 2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak .....            | 14   |
| 2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ..... | 16   |
| 2.6 Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 .....    | 18   |
| 2.7 Kepatuhan Pajak.....                        | 20   |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.8 Moral Pajak .....   | 23        |
| 2.8.1 Sosial Kemasyarakatan .....                               | 24        |
| 2.8.2 Gender .....  | 25        |
| 2.8.3 Tingkat Pendidikan .....                                  | 26        |
| 2.9 Sanksi Pajak .....  | 27        |
| 2.10 Kerangka Konseptual Penelitian .....                       | 31        |
| 2.11 Perumusan Hipotesis .....                                  | 33        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                          | <b>38</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                      | 38        |
| 3.2 Populasi Dan Sample .....                                   | 38        |
| 3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel ..... | 39        |
| 3.3.1 Variabel Independen .....                                 | 40        |
| 3.3.2 Variabel Dependen .....                                   | 42        |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data .....                                 | 44        |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....                               | 44        |
| 3.6 Metode Analisis Data .....                                  | 44        |
| 3.6.1 <i>Outer Model</i> .....                                  | 46        |
| 3.6.2 <i>Inner Model</i> .....                                  | 47        |
| 3.7 Analisis Sensitivitas ( <i>Sensitivity Analysis</i> ) ..... | 48        |
| 3.8 Hasil Pilot Test .....                                      | 48        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>             | <b>53</b> |
| 4.1 Deskriptif Objek Penelitian .....                           | 53        |
| 4.2 Deskriptif Jawaban Responden .....                          | 54        |

|   |    |
|---|----|
| 4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Sosial Kemasyarakatan.....         | 55 |
| 4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Gender .....                       | 56 |
| 4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan.....            | 56 |
| 4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak .....                 | 57 |
| 4.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak.....               | 58 |
| 4.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian .....                         | 59 |
| 4.3.1 Uji <i>Outer Model</i> .....                                    | 59 |
| 4.3.2 Uji <i>Inner Model</i> .....                                    | 63 |
| 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....                                   | 66 |
| 4.5 Hasil Analisis Sensitivitas ( <i>Sensitivity Analysis</i> ) ..... | 66 |
| 4.6 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis .....                        | 70 |
| 4.6.1 Pengaruh Sosial Kemasyarakatan Terhadap Kepatuhan Pajak.....    | 70 |
| 4.6.2 Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak .....                  | 71 |
| 4.6.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak.....       | 72 |
| 4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.....             | 73 |
| BAB V PENUTUP.....  | 75 |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 75 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian.....                                      | 76 |
| 5.3 Saran.....  | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 78 |
| LAMPIRAN.....   | 81 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pendapatan suatu negara mencerminkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pajak adalah salah satu penerimaan pendapatan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya pembangunan negara yang dibebankan kepada masyarakat. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Negara Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah 262 juta jiwa ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), dan berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 hanya 32,77 juta jiwa yang terdaftar memiliki NPWP. Berdasarkan jumlah tersebut wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunnya hanya 12,5 juta jiwa. Pada tahun 2016 tersebut pendapatan negara dalam penerimaan pajak sebesar 1.546,7 (angka dalam triliun rupiah). Penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pendapatan negara dalam penerimaan pajak sebesar 1.498,9 (angka dalam triliun rupiah) ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan bahwa

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan.

Sejalan dengan menurunnya persentase penerimaan negara Indonesia yang bersumber dari pajak, DJP terus berupaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Target penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang menunjukkan penurunan. Semakin meningkatnya target penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerimaan dari sumber pajak ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, sedangkan faktor internal meliputi obyek pajak dan tarif pajak.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Adanya penerapan *selfassesment system* dan program reformasi yang substansial diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *selfassesment system* hanya akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak nampak masih sangat rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara



diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor moral dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun

dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mengadopsi penelitian Cahyonowati (2011) yang membahas mengenai moral pajak. Moral pajak (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Scheneider, 2004). Penelitian ini juga menambahkan variabel sanksi pajak, karena faktor moral pajak saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan adanya usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang upaya kepatuhan pajak. Beberapa penelitian mengenai moral pajak di Indonesia diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) yang menguji pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan jika moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subandi (2012) mengenai moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak yang mana memperhatikan karakteristik budaya Wajib Pajak orang pribadi yaitu berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura, yang menunjukkan hasil bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) mengenai pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan bahwa gender merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi wajib pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengadopsi penelitian Pranata & Setiawan (2015) dengan menambahkan faktor sanksi pajak, karena faktor moral saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak secara sukarela patuh terhadap pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai sanksi pajak yaitu dilakukan oleh Siregar (2017), mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pranata dan Setiawan (2015) mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013) mengenai pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, (1) pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan perpajakan yang berlaku. (2) pelaku UMKM umumnya orang pribadi. Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun lalu (2017) masih jauh dari target. Dari target Rp156,18

triliun, yang terealisasi hanya Rp106,33 triliun atau 68,08%. Raihan ini anjlok dibandingkan dengan 2016 yang mencapai Rp117,68 triliun atau 80,77% ([www.klinikpajak.go.id](http://www.klinikpajak.go.id)). Salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah.

Salah satu wilayah yang berkontribusi dari segi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yaitu Kota Malang. Di Kota Malang sendiri berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, terdapat 1,161 UMKM di Kota Malang (<http://dinkop.malangkota.go.id/>).

Kota Malang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup baik di Jawa Timur, sebab sebagai kota pendidikan dengan berbagai universitas negeri maupun swasta dan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah, mampu menggerakkan sektor ekonomi riil, sehingga menggerakkan UMKM menjadi sebuah misi pemerintah agar laju inflasi bisa ditekan sekaligus menaikkan daya ekonomi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini.

Beberapa dari penelitian mengenai moral pajak dan sanksi pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan pajak UMKM mengenai moral pajak dengan menambahkan variabel sanksi pajak. Moral pajak yang akan diteliti diantaranya variabel sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan menambahkan variabel sanksi

pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Malang. Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah kepatuhan perpajakan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul, **“Pengaruh Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM Di Kota Malang)”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosial kemasyarakatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh sosial kemasyarakatan terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM.



2. Untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM.
3. Untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM.
4. Untuk menjelaskan dan memprediksi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal teoritis, praktik maupun kebijakan dalam bidang perpajakan.

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan mengenai *tax morale* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan variabel sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Malang.

##### 2. Praktis

Sebagai bahan masukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak dari berbagai sudut pandang, antara lain pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:4), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Selanjutnya Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang (2) tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3)

pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan, (6) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

## 2.2 Fungsi Pajak

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) yaitu;

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contohnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

Berdasarkan fungsi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

### **2.3 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2017:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

#### **1. Menurut Golongannya**

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **2. Menurut Sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak**

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

## 2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak seperti menurut Resmi (2017:9) dibagi menjadi tiga, yaitu;

### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya:

#### a. Stelsel Nyata (*Riil*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

#### b. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Kekurangan stelsel



fiktif adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPH Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:9) dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah memiliki bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi yang ada

untuk peningkatan ekonomi. Menurut Undang –Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 terdapat beberapa kriteria untuk UMKM, yaitu;

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### 3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### 2.6 Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1 % dari jumlah omset. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut kriterianya yaitu;

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap, dan

2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak semua Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan yang memiliki Omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar namun tidak dapat menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu, sebagai berikut;

1. Menerima penghasilan dari usaha yang penghasilannya berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; atau
2. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang (baik menetap atau tidak menetap); dan
3. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar namun tidak dapat menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu;

1. Menerima penghasilan dari usaha yang penghasilannya berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. Belum beroperasi secara komersial; atau
3. Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet lebih Rp 4,8 miliar.

## 2.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan pajak identik dengan ketersediaan seseorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Nurmantu (2000), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni, Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan pajak formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 terdapat kriteria Wajib Pajak patuh yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir



2. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat yang telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya
4. Seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Menurut Franzoni (1999) yang dimaksud dengan kepatuhan pajak material yaitu kepatuhan terhadap hukum perpajakan secara khusus berarti a) kebenaran dalam melaporkan pajak terutang, b) kebenaran dalam membayar pajak terutang, c) tepat waktu dalam melaporkan pajak terutang, dan d) tepat waktu dalam membayar pajak terutang.

Pada penelitian ini konstruk yang digunakan sebagai dasar dalam membentuk kepatuhan pajak diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Konstruk Yang Membentuk Kepatuhan Perpajakan**

| <b>Konstruk</b>          | <b>Definisi</b>   | <b>Item</b>  |
|--------------------------|---|--|
| Kepatuhan pajak formal   | Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut</li> <li>2. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa yang terlambat tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya</li> <li>3. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 tahun terakhir</li> <li>4. Tepat waktu membayar pajak dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir</li> <li>5. Tepat waktu dalam membayar dan melaporkan jenis pajak tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak</li> </ol> |
| Kepatuhan pajak material | Wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selalu membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan</li> <li>2. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan</li> <li>3. Selalu tepat waktu membayar dan melaporkan pajak</li> </ol>   |

## 2.8 Moral Pajak

Moral pajak (*Tax Morale*) didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Togler & Schneider 2004 dalam Cahyonowati 2011). Kasadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Terdapat wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak dengan patuh. Hal itu tak lain dan tak bukan disebabkan adanya *tax morality*, yaitu faktor etika. Manusia tidak selalu bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang membentuk etika. Dengan etika ini, bisa digunakan untuk mengarahkan pada perilaku patuh pajak.

Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) terdapat beberapa aspek dalam membentuk moralitas pajak yaitu, (1) aspek budaya, Aspek ini menyiratkan adanya faktor sosio-demografi dan sosio-ekonomi yang memiliki peran penting

dalam menentukan moralitas pajak di masyarakat. (2) kepercayaan terhadap pemerintah, pengaruh kepercayaan terhadap kelembagaan dimana pemerintah bekerja. Kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan sangat menentukan karena pemerintah harus menjamin bahwa pendapatan yang didapat dari pajak harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan (3) aspek kebijakan dan administrasi, kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan harus memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak karena ini bisa memengaruhi keinginan individu untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, dalam penelitian akan meneliti mengenai moral pajak yang terdiri dari variabel sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dengan menambahkan variabel sanksi pajak.

### **2.8.1 Sosial Kemasyarakatan**

Menurut Cahyonowati (2011), variabel kemasyarakatan bisa dijelaskan dengan dua defenisi. Pertama, sebuah indikator untuk menilai seberapa luas warga negara mengenal negaranya beserta lembaga-lembaga nasional yang ada didalamnya. Kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima dan berlaku umum dimasyarakat.

Dalam bagian sosial kemasyarakatan pada penelitian ini diantaranya, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kebanggaan nasional. Tingkat kepercayaan sangat penting dalam sosial kemasyarakatan ini, karena jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan

terus bertambah. Sosial kemasyarakatan ini mengukur tingkat kepercayaan individu terhadap institusi negara dengan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan peradilan.

Pada penelitian ini konstruk yang digunakan sebagai dasar dalam membentuk sosial kemasyarakatan diuraikan sebagai berikut;

**Tabel 2.2**  
**Konstruk Yang Membentuk Sosial Kemasyarakatan**

| <b>Konstruk</b>                        | <b>Definisi</b>                                  | <b>Item</b>   |
|--|--|---|
| Kepercayaan terhadap sistem hukum      | Kepercayaan wajib pajak kepada sistem hukum      | 1.Motivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap lembaga peradilan di Indonesia dalam memutuskan dengan tepat dan benar kasus-kasus perpajakan yang ada                                    |
| Kepercayaan terhadap sistem perpajakan | Kepercayaan wajib pajak kepada sistem perpajakan | 1. Kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan<br>2. Motivasi membayar pajak dikarenakan tarif pajak yang berlaku<br>3. Motivasi membayar pajak dikarenakan kemudahan proses pelaporan dan pembayaran |
| Kebanggaan nasional                    | Kebanggaan wajib pajak dengan identitas nasional | 1. Kebanggaan saya sebagai warga negara Indonesia   |

### 2.8.2 Gender

Gender dikategorikan pria dan wanita. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (Handayani dan Sugiarti, 2006 :7). Menurut Mufidah (2003),

memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dilihat dari segi sosial dan budaya. Gender dalam arti tersebut mendefinisikan pria dan wanita dari sudut non biologis.

Dalam penelitian ini akan menguji apakah gender yang dikategorikan pria dan wanita memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Widodo (2010: 20-21) menyatakan bahwa pria memiliki motivasi untuk membayar pajak dibandingkan wanita. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Feld dan Togler (2007) menunjukkan bahwa wanita lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada pria, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

### **2.8.3 Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sikap dan berperilaku dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Feld dan Torgler (2007) di Jerman pada tahun 1999 menunjukkan jika pendidikan berpengaruh negatif terhadap moralitas pajak.



Hal tersebut terjadi karena wajib pajak dengan pendidikan yang lebih baik akan lebih mengetahui kesempatan untuk menghindari dan melakukan penggelapan pajak serta mereka akan lebih kritis terhadap bagaimana pemerintah melakukan pajak yang mereka bayarkan dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpatuhan dalam pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh.

## **2.9 Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **1. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

a. Sanksi Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, dalam tabel berikut dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. Berikut merupakan table sanksi administrasi berupa denda:

**Tabel 2.3**  
**Sanksi Administrasi Berupa Denda**

| No | Masalah  | Cara Membayar/menagih  |
|----|--|--|
| 1. | Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT.   | STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-  |
| 2. | Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum di sidik.   | SSP ditambah 15%   |
| 3. | Khusus PPN:<br>Tidak melaporkan usaha<br>Tidak membuat/mengisi faktur<br>Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) | SSP/SPKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan   |
| 4. | Khusus PBB:<br>STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar<br>Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar                   | STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).<br><br>SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang |

Sumber: Mardiasmo (2016)

b. Sanksi Bunga 2% per bulan

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:

- 1) Bunga karena pembetulan STP
- 2) Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran
- 3) Bunga karena terlambat membayar
- 4) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Untuk sanksi administrasi dengan kenaikan pajak, wajib pajak harus membayar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB, dikarenakan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## 2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau bentang hukuman yang digunakan fiskus agar norma perpajakan diketahui. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

### a. Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

### b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekuat itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

### c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Pada penelitian ini, konstruk yang digunakan dalam membentuk sanksi pajak diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Konstruk Yang Membentuk Sanksi Pajak**

| Konstruk            | Definisi                                 | Item                                     |
|---------------------|--|--|
| Sanksi administrasi | Sanksi pembayaran kerugian kepada negara | 1. Sanksi administrasi pelanggaran pajak |
| Sanksi pidana       | Sanksi siksaan atau penderitaan          | 1. Sanksi pidana pelanggaran pajak       |

## 2.10 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Togler & Schneider (2004), moral pajak (*tax morale*) didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Pada penelitian ini moral pajak yang akan diuji yaitu konstruk sosial kemasyarakatan, gender, pendidikan, dan menambahkan konstruk sanksi pajak.

Penelitian mengenai moral pajak di Indonesia pernah dilakukan oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) yang menguji pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan jika moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, penelitian mengenai moral pajak juga dilakukan oleh Subandi (2012) mengenai moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak yang mana memperhatikan

karakteristik budaya wajib pajak orang pribadi yaitu berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura yang menunjukkan hasil bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

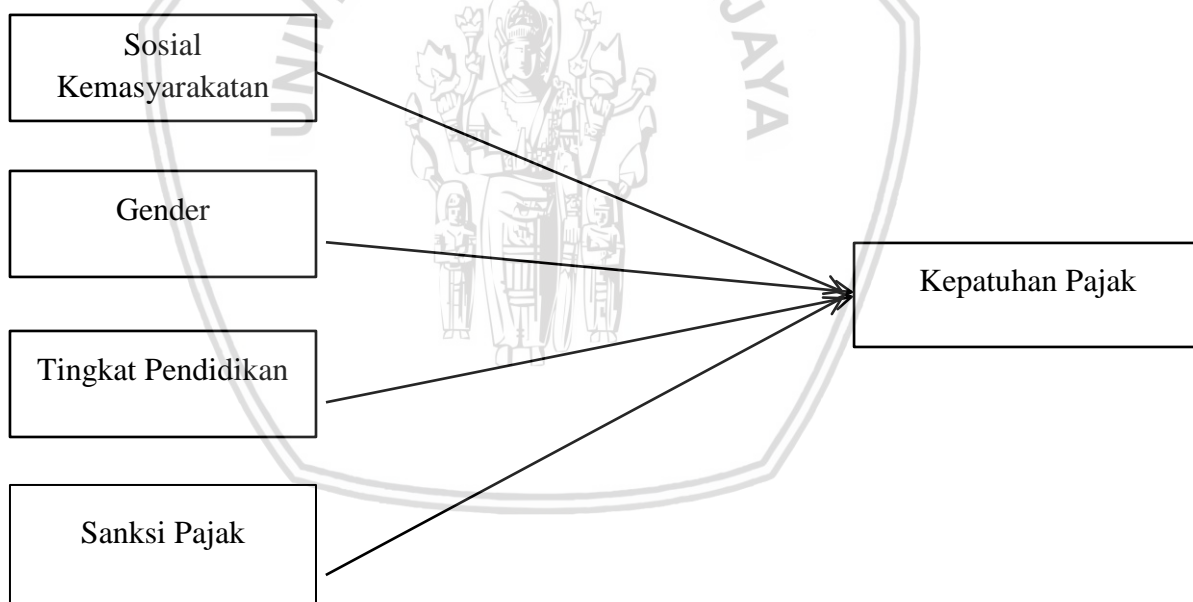
Selain itu, penelitian mengenai pengaruh gender dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) yang menguji pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan bahwa gender merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian ini juga menambahkan faktor sanksi pajak. Penelitian mengenai sanksi pajak dilakukan oleh Siregar (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013) mengenai pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.



Beberapa dari penelitian mengenai moral dan sanksi pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan menambahkan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Kerangka konseptual penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

**Gambar 2.1**  
**Gambar Kerangka Konseptual Penelitian**



## **2.11 Perumusan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Sosial Kemasyarakatan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Menurut Cahyonowati (2011), variabel kemasyarakatan bisa dijelaskan dengan dua defenisi. Pertama, sebuah indikator untuk menilai seberapa luas warga

negara mengenal negaranya beserta lembaga-lembaga nasional yang ada didalamnya. Kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima dan berlaku umum dimasyarakat. Variabel sosial kemasyarakatan yang akan diteliti yaitu, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kebanggaan nasional.

Menurut penelitian yang dilakukan Torgler (2003), sosial kemasyarakatan menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan, dan pejabat pemerintah, kebanggaan nasional dan religiusitas berpengaruh positif terhadap moralitas pajak. Penelitian yang dilakukan Khaerunnisa & Wiratno (2014) yang menunjukkan hasil bahwa variabel moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muthia (2013), menunjukkan bahwa moral pajak dengan indikator kebanggaan nasional, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak dan variabel budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya responden yang memiliki moral pajak yang tinggi maka akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya.

Hal ini menandakan bahwa untuk mengetahui kepatuhan perpajakan pada wajib pajak dapat dilakukan dengan meneliti faktor-faktor sosial kemasyarakatan kepada para wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh sosial kemasyarakatan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H1: Sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak**

## **2. Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak**

Menurut Handayani dan Sugiarti (2006:7) konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya. Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dilihat dari segi sosial dan budaya (Mufidah 2003). Gender dalam arti tersebut mendefinisikan pria dan wanita dari sudut non biologis.

Penelitian oleh Aryati (2012) yang menyatakan bahwa gender merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gender merupakan faktor individual yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh gender terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H2: Gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak**

## **3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sikap dan berperilaku dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka tingkat pengetahuan juga akan semakin luas terutama mengenai peraturan perpajakan. Tingkat pendidikan mempengaruhi individu memahami manfaat membayar pajak serta lebih kritis menanggapi terhadap kondisi negara, dan individu juga lebih mahir dalam mensiasati aturan pajak yang dapat menurunkan kualitas kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Freddy (2014) menunjukkan hasil bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitriyani, Prasetyo, Yustien, & Hizazi (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa untuk mengetahui kepatuhan pajak pada wajib pajak dapat dilakukan dengan meneliti faktor tingkat pendidikan yang dicapai kepada para wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis berikut:

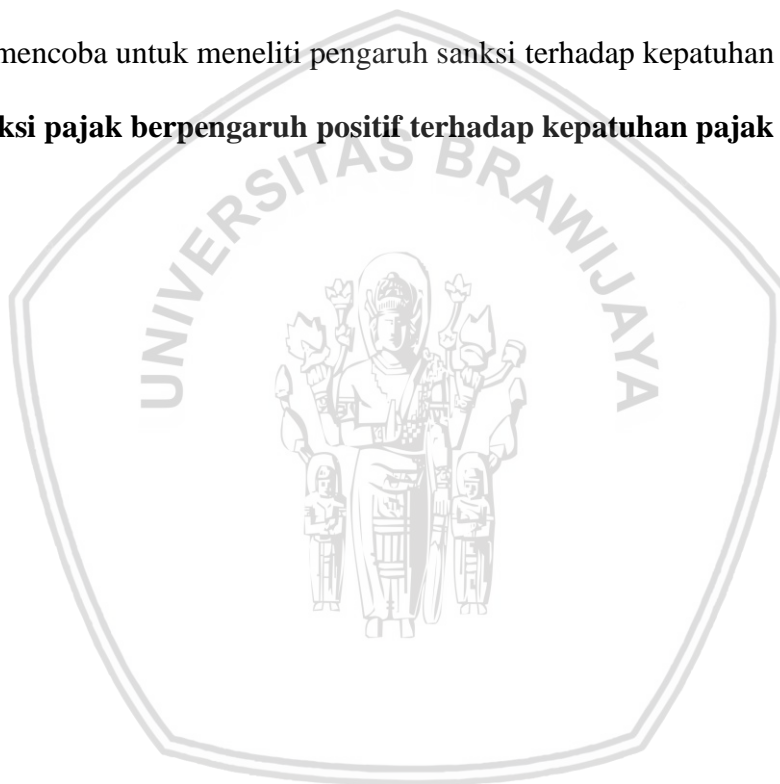
**H3: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak**

#### **4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan Siregar (2017) bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun semakin tinggi. Maka sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Septarini (2015) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015)

yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya responden yang memahami mengenai sanksi perpajakan akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya. Hal ini menandakan bahwa untuk mengetahui kepatuhan pada wajib pajak dapat dilakukan dengan meneliti mengenai pemahaman sanksi kepada para wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak.

**H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut effendi dan tukiran (2012), *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang diajukan.

#### 3.2 Populasi Dan Sampel

Menurut Chandrarin (2017:125), Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang. Berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, terdapat 1,161 UMKM di Kota Malang. Populasi terdiri atas ribuan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi semua, oleh karena itu peneliti menggunakan sampel. Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi (Chandararin (2017:125). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan *convenience sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel secara nonprobabilitas

(*nonprobability sampling*). *Convenience sampling* yaitu metode penyempelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun (Chandrarin, 2017:127).

Dengan penentuan ukuran sampel yang menggunakan rumus Slovin (Chandrarin, 2017:131), jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1161}{1 + 1161 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{92.06}{92}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan yang ditetapkan tetapi masih ditolerir yaitu 10%

### 3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independennya adalah sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan sanksi pajak, dan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Pengukuran tiap konstruk menggunakan skala ordinal 1 sampai dengan 5 yang mempunyai arti sebagai berikut (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Selain itu, terdapat beberapa data lainnya yang harus diisi oleh responden diantaranya umur, status pernikahan (Nikah/ Lajang/ Duda/ Janda), hasil omzet dalam setahun (a. ≤ Rp 300.000.000, b. Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000, c. RP 2.500.000.000 – RP 50.000.000.000. Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 3.3.1 Variabel Independen

Variabel bebas atau independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sosial Kemasyarakatan

Dalam bagian sosial kemasyarakatan pada penelitian ini diantaranya, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kebanggaan nasional. Tingkat kepercayaan sangat penting dalam sosial kemasyarakatan ini, karena jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan terus bertambah. Sosial kemasyarakatan ini mengukur tingkat kepercayaan individu terhadap institusi negara dengan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan peradilan.

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator sosial kemasyarakatan, yaitu;

- a. Kepercayaan terhadap sistem hukum
- b. Kepercayaan terhadap sistem perpajakan
- c. Kebanggaan nasional

#### 2. Faktor Gender

Menurut Widodo (2010: 20-21) menunjukkan bahwa pria memiliki motivasi untuk membayar pajak dibandingkan wanita. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak pria sebagai penanggung jawab dalam kegiatan perekonomian keluarganya. Dominasi pria dalam kegiatan perekonomian dan keuangan turut berperan serta dalam hal pelaksanaan kewajiban membayar pajak,

sehingga dalam hal kesadaran untuk membayar pajak didominasi pula oleh wajib pajak pria daripada wajib pajak wanita. Penelitian yang dilakukan oleh Feld dan Togler (2007) menunjukkan bahwa wanita lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada pria. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

### **3. Tingkat Pendidikan**

Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka tingkat pengetahuan juga akan semakin luas terutama mengenai peraturan perpajakan, lebih memahami manfaat membayar pajak serta lebih kritis menanggapi terhadap kondisi negara, dan individu juga lebih mahir dalam mensiasati aturan pajak yang dapat menurunkan kualitas kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator tingkat pendidikan yaitu pendidikan tertinggi yang telah dicapai dengan kategori SMA, Diploma, Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2).

### **4. Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:62), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan atas pelaksanaan tindakan yang dilarang yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator sanksi pajak yaitu;

- a. Sanksi administrasi
- b. Sanksi pidana

### 3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Menurut Nurmantu (2000), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua indikator yaitu;

#### 1. Kepatuhan Pajak Formal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, kepatuhan pajak formal dapat dilihat dari sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. SPT Masa yang terlambat yang telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
- d. Seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
- e. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

## 2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material adalah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan dari hukum perpajakan. Indikator yang digunakan dalam kepatuhan pajak material yaitu:

- a. Tingkat kebenaran dalam menghitung kewajiban pajak yang dibayarkan.
- b. Tingkat kebenaran dalam membayarkan dan melaporkan kewajiban pajak.
- c. Tingkat ketepatan dalam menyampaikan SPT

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Chandararin (2017:123), data primer adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Dalam hal ini, data sumber didapat dari hasil kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden (Bungin: 2005:133). Penelitian dan pengumpulan kuesioner dilakukan dengan cara didistribusikan langsung kepada responden dalam hal ini wajib pajak UMKM di Kota Malang.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian lapangan atau survei. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi dari wajib pajak orang pribadi. Kuesioner dibagikan dengan cara menyebar sebanyak 100 kuesioner dengan mendatangi wajib pajak ke tempat usahanya. Peneliti menyebar 100 kuesioner karena peneliti mengantisipasi kurangnya responden dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan selama 3 minggu. Responden diminta menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner sesuai dengan pendapat mereka.

### 3.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis *Partial Least Square* (PLS) yang menggunakan

software SmartPLS 3. Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2016:14), PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2016:15), PLS memiliki keunggulan yaitu tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada data yang mengalami asumsi klasik, dapat digunakan pada ukuran sampel yang kecil dan dapat digunakan untuk konstruk formatif dan reflektif. Alat analisis statistik ini dipilih karena model teoritis penelitian ini relative kompleks. Metode PLS ini juga mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. PLS sangat tepat digunakan untuk memprediksi suatu model yang bertujuan untuk mengembangkan teori.

PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) yang dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model secara simultan yang berbasis varian (Jogiyanto dan Abdillah, 2016:14). PLS merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan dibandingkan SEM berbasis kovarian seperti LISREL, AMOS dan OLS yaitu tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada data yang mengalami asumsi klasik (data

yang tidak terdistribusi normal, masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi, dapat digunakan pada ukuran sampel yang kecil dan dapat digunakan untuk konstruk formatif dan reflektif (Tenenhaus et al., 2005, dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2016:15).

PLS merupakan model prediksi yang bertujuan untuk menguji efek prediksi antar variabel laten untuk melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Sebagai konsekuensinya, penggunaan model prediksi adalah dapat dilakukan pengujian tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan berapa asumsi dan parameter ketepatan model prediksi yang dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2016:20), koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah ukuran tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini digunakan untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang nilai 0 sampai dengan 1. Model prediksi sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk pengembangan teori.

### 3.6.1 *Outer Model*

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2016), *outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model, melalui proses iterasi *algoritma*, parameter model pengukuran (validitas konvergen, diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha*) diperoleh. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu model, uji validitas terkait seberapa baik suatu instrument yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Jogiyanto dan Abdillah, 2016). Parameter pengukuran *outer model* adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Parameter Pengukuran *Outer model***

| Pengujian                 | Parameter                               | Rule of Thumbs                     | Keterangan   |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| Uji Validitas Konvergen   | <i>Faktor Loading</i>                   | Lebih dari 0.7                     | - Indikator dengan <i>faktor loading</i> dibawah 0,4 harus dihapus dari model.<br>- Indikator dengan <i>faktor loading</i> antara 0,4 – 0,7 sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu dampak dari keputusan menghapus indikator tersebut terhadap nilai AVE dan <i>Composite Reliability</i> (Solihin dan Ratmono, 2013). |
|                           | <i>Avarage Variance Extracted (AVE)</i> | Lebih dari 0.5                     | -  |
|                           | <i>Communality</i>                      | Lebih dari 0.5                     | -  |
| Uji Validitas Diskriminan | Akar AVE dan korelasi variabel laten    | Akar AVE > Korelasi Variabel Laten | -  |
|                           | <i>Cross Loading</i>                    | Lebih dari 0.7                     | -  |
| Uji Reliabilitas          | <i>Cronbanch's Alpha</i>                | Lebih dari 0.6                     | -  |
|                           | <i>Composite Reliability</i>            | Lebih dari 0.7                     | -  |

Sumber: Jogiyanto dan Abdillah (2016)

### 3.6.2 *Inner Model*

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2016), *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui proses *bootstrapping*, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural PLS diuji dengan mengukur nilai  $R^2$  dan koefisien *path* yang ditunjukkan oleh nilai T-statistic pada output smartPLS. Berikut adalah parameter pengukuran *inner model* dalam PLS:

a. Nilai  $R^2$

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

b. Nilai Koefisien *Path*

Nilai Koefisien *Path* digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai Koefisien *Path* yang ditunjukkan oleh *T-statistic* harus diatas 1,96 untuk hipotesis *two-tailed*, dan diatas 1,64 untuk hipotesis *one-tailed*.

### 3.7 Analisis Sensitivitas (*Sensitivity Analysis*)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) 24. Teknik analisis yang digunakan untuk analisis sensitivitas dalam penelitian ini adalah independent sample t-test dan kruskal wallis test. Analisis sensitivitas merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan bagaimana perbedaan nilai variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa sensitiv suatu keputusan terhadap perubahan faktor atau parameter yang mempengaruhinya, maka setiap pengambilan keputusan seharusnya disertai dengan analisa sensitivitas. Tujuan utama dari analisis sensitivitas digunakan untuk pengecekan penyelesaian, keputusan, maupun kesimpulan yang sudah ada.

### 3.8 Hasil Pilot Tes

Pilot test dalam studi ini dilakukan dengan menyebarkan kepada non-sampel, yaitu mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi angkatan 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Berikut ini merupakan hasil pilot test:

#### 1. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas konvergen adalah dengan nilai AVE (*Avarage Varians Extracted*) dan *Communality* adalah lebih dari 0.5 dan nilai *outer loading* lebih dari 0.4 - 0.7 (Soilihin dan Ratmono, 2013). Berikut merupakan hasil uji validitas konvergen;

**Tabel 3.2**  
**Nilai Outer Loadings**

| Konstruk | SK    | SP    | KP    |
|----------|-------|-------|-------|
| SK1      | 0.529 |       |       |
| SK2      | 0.609 |       |       |
| SK3      | 0.701 |       |       |
| SK4      | 0.906 |       |       |
| SK5      | 0.746 |       |       |
| SK6      | 0.756 |       |       |
| SP1      |       | 0.93  |       |
| SP2      |       | 0.907 |       |
| KP1      |       |       | 0.824 |
| KP2      |       |       | 0.760 |
| KP3      |       |       | 0.704 |
| KP4      |       |       | 0.623 |
| KP5      |       |       | 0.666 |
| KP6      |       |       | 0.607 |
| KP7      |       |       | 0.649 |
| KP8      |       |       | 0.806 |

**Tabel 3.3**  
**Nilai AVE dan *Communality***

| <b>Konstruk</b> | <b>AVE</b> | <b><i>Communality</i></b> |
|-----------------|------------|---------------------------|
| SK              | 0.515      | 0.515                     |
| SP              | 0.844      | 0.844                     |
| KP              | 0.503      | 0.503                     |

Tabel 3.2 menunjukkan nilai *outer loading* konstruk dan indikator di atas 0.5. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator pada masing-masing konstruk sudah valid. Dan pada tabel 3.3, diketahui bahwa nilai AVE dan *communality* di atas 0.5.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan minimal dari validitas konvergen, yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada item-item pernyataan di dalam kuesioner yang dihapus.

## **2. Validitas Diskriminan**

Pengujian yang kedua adalah uji validitas diskriminan. Suatu instrument dikatakan lolos uji validitas diskriminan apabila memenuhi dua parameter, yaitu nilai akar AVE > korelasi variabel laten dan nilai cross loading lebih dari 0,7 dalam satu variabel (Abdillah dan Hartono, 2016). Hasil akar AVE dan korelasi variabel laten dari pilot test dapat dilihat pada tabel 3.4 dan hasil *cross loading* dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten**

| Konstruk | Akar AVE | KP    | SK    | SP    |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| KP       | 0.709    | 1     | 0.814 | 0.798 |
| SK       | 0.718    | 0.814 | 1     | 0.474 |
| SP       | 0.919    | 0.798 | 0.474 | 1     |

**Tabel 3.5**  
**Nilai *Cross Loadings***

|     | KP    | SK    | SP     |
|-----|-------|-------|--------|
| KP1 | 0.824 | 0.627 | 0.688  |
| KP2 | 0.760 | 0.435 | 0.793  |
| KP3 | 0.704 | 0.480 | 0.615  |
| KP4 | 0.623 | 0.444 | 0.664  |
| KP5 | 0.665 | 0.716 | 0.384  |
| KP6 | 0.607 | 0.680 | 0.270  |
| KP7 | 0.649 | 0.546 | 0.413  |
| KP8 | 0.806 | 0.708 | 0.610  |
| SK1 | 0.153 | 0.529 | -0.072 |
| SK2 | 0.354 | 0.609 | 0.000  |
| SK3 | 0.474 | 0.701 | 0.192  |
| SK4 | 0.758 | 0.906 | 0.361  |
| SK5 | 0.493 | 0.746 | 0.271  |
| SK6 | 0.833 | 0.756 | 0.729  |
| SP1 | 0.779 | 0.395 | 0.930  |
| SP2 | 0.680 | 0.480 | 0.907  |

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa akar AVE konstruk bernilai lebih besar daripada korelasi variabel laten antar konstruk. Dan berdasarkan tabel 3.6, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* adalah lebih dari 0.7 atau antara 0.4 – 0.7. Dengan demikian, melalui uji validitas diskriminan dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan minimal dari validitas diskriminan. Telah terpenuhinya uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan dapat diketahui bahwa konstruk dan

indikator yang digunakan dalam studi ini dinilai valid. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada item-item pernyataan di dalam kuesioner yang dihapus.

### 3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen yang digunakan oleh peneliti (Abdillah dan Hartono, 2016). Parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas adalah nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7. Hasil nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut;

**Tabel 3.6**  
**Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability**

| Konstruk | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>Composite Reliability</i> |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| SK       | 0.820                   | 0.861                        |
| SP       | 0.816                   | 0.915                        |
| KP       | 0.856                   | 0.889                        |

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam studi ini memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam studi ini memenuhi uji reliabilitas sehingga alat ukur yang digunakan dalam studi ini dinilai konsisten untuk dapat digunakan.

Dengan terpenuhinya uji validitas dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa instrumen pengukuran atau kuesioner dalam studi ini telah valid dan reliabel. Oleh karena itu, kuesioner dapat digunakan untuk pengujian pada sampel yang sesungguhnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki faktor sosial kemasyarakatan yang tinggi maka akan semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak lebih terdorong untuk patuh oleh karena adanya sanksi itu sendiri yang dianggap merugikan jika melakukan pelanggaran perpajakan. Kondisi ini mencerminkan bahwa makin tinggi sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Responden yang memahami mengenai sanksi perpajakan akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya.

Selanjutnya, gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender laki-laki atau perempuan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan, karena laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki penghasilan mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Selain itu, tingkat pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang merata dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pengetahuan yang tidak merata menyebabkan masyarakat memiliki tingkat nasionalisme dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang berbeda-beda. Misalnya saja jika individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakan, namun individu tersebut tidak memiliki nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah maka individu tersebut cenderung untuk tidak membayar pajak. Sebaliknya jika individu yang berpendidikan rendah namun individu tersebut memiliki nasionalisme yang tinggi, maka individu tersebut akan cenderung membayar pajak. Sehingga tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh responden tidak menjamin wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Kendala yang peneliti temukan selama melakukan penelitian, yaitu beberapa responden menolak untuk mengisi kuesioner yang hendak diberikan dengan alasan sibuk atau tidak ada waktu. Selain itu, terdapat beberapa kuesioner yang tidak kembali, dengan alasan kuesioner hilang atau lupa oleh responden itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 23 kuesioner yang tidak kembali.

### 5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu;

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner, sehingga kuesioner tersebut dapat dipastikan terisi dan kembali ke peneliti.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan ruang lingkup populasi dan sampel yang lebih besar, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
3. Bagi pemerintahan khususnya Dirjen pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskriptif Objek Penelitian

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Metode survei dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden secara langsung kepada responden.

Kuesioner yang disebarkan ke wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang sebanyak 100 kuesioner. Data sample penelitian pada table 4.1 di bawah ini berisi tentang kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali, kuesioner yang tidak kembali, dan kuesioner yang dapat diolah.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Pengembalian Kuesioner**

|   |     |
|---|-----|
| Jumlah Sampel                             | 100 |
| Kuesioner yang disebar                    | 100 |
| Kuesioner yang kembali                    | 77  |
| Kuesioner yang tidak kembali              | 23  |
| Kuesioner yang dapat diolah               | 77  |
| Tingkat pengembalian yang dapat digunakan | 77% |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berikut deskripsi gambaran secara umum mengenai data responden yang menjadi data pada penelitian dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.2**  
**Deskriptif Responden**

| <b>Deskripsi</b>          | <b>Keterangan</b>                       | <b>Jumlah</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------|
| Jenis Kelamin             | Laki-Laki                               | 32            | 42%                   |
|                           | Perempuan                               | 45            | 58%                   |
|                           | <b>Total</b>                            | 77            | 100%                  |
| Usia                      | 30-40 tahun                             | 14            | 18%                   |
|                           | 41-50 tahun                             | 21            | 27%                   |
|                           | >50 tahun                               | 42            | 55%                   |
|                           | <b>Total</b>                            | 77            | 100%                  |
| Tingkat Pendidikan        | SMA                                     | 18            | 23%                   |
|                           | Diploma                                 | 25            | 32%                   |
|                           | S1                                      | 31            | 41%                   |
|                           | S2                                      | 3             | 4%                    |
|                           | S3                                      | -             | -                     |
|                           | <b>Total</b>                            | 77            | 100%                  |
| Hasil omzet dalam setahun | a. $\leq$ Rp 300.000.000                | 14            | 18%                   |
|                           | b. Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000    | 42            | 55%                   |
|                           | c. Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000 | 21            | 27%                   |
|                           | <b>Total</b>                            | 77            | 100%                  |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

#### 4.2 Deskriptif Jawaban Responden

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada kuesioner. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengolah jawaban responden berdasarkan indikator. Hal tersebut dilakukan untuk

mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, dan distribusi daya yang meliputi mean, median, dan deviasi standar (Hartono, 2010).

#### 4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Sosial Kemasyarakatan

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk sosial kemasyarakatan disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Sosial Kemasyarakatan**

| Indikator | N  | Minimum | Maksimum | Mean  | Median | Standar Deviasi |
|-----------|----|---------|----------|-------|--------|-----------------|
| SK1       | 77 | 3.000   | 5.000    | 4.208 | 4.00   | 0.518           |
| SK2       | 77 | 2.000   | 5.000    | 4.091 | 4.00   | 0.628           |
| SK3       | 77 | 2.000   | 5.000    | 3.909 | 4.00   | 0.809           |
| SK4       | 77 | 1.000   | 5.000    | 3.792 | 4.00   | 0.827           |
| SK5       | 77 | 1.000   | 5.000    | 3.909 | 4.00   | 0.871           |
| SK6       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.143 | 4.00   | 0.833           |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk sosial kemasyarakatan. Berdasarkan tabel tersebut skala dapat diketahui skala minimum untuk indikator SK1 adalah 3 (netral), indikator SK2 dan SK3 adalah 2 (Tidak Setuju) dan untuk indikator SK4, SK5, SK6 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai median pada seluruh indikator konstruk ini adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka

semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010)

#### 4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Gender

Deskripsi jawaban responden terhadap gender disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Gender**

| Indikator | N  | Minimum | Maksimum | Mean  | Median | Dev Standar |
|-----------|----|---------|----------|-------|--------|-------------|
| G1        | 77 | 1.00    | 2.00     | 1.584 | 2.00   | 0.49        |

**Sumber:** Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk gender. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk indikator G1 adalah 1 (laki-laki). Skala maksimum untuk indikator adalah 2 (perempuan). Nilai median pada indikator konstruk ini adalah 2. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010).

#### 4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan

Deskripsi jawaban responden terhadap tingkat pendidikan disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Tingkat pendidikan**

| <b>Indikator</b> | <b>N</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maksimum</b> | <b>Mean</b> | <b>Median</b> | <b>Dev Standar</b> |
|------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| P1               | 77       | 1.00           | 4.00            | 2.247       | 2.00          | 0.855              |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap konstruk tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk indikator P1 adalah 1 (SMA). Skala maksimum untuk indikator adalah 4 (S2). Nilai median pada indikator konstruk ini adalah 2. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010).

#### **4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak**

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk Sanksi Pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Sanksi Pajak**

| <b>Indikator</b> | <b>N</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maksimum</b> | <b>Mean</b> | <b>Median</b> | <b>Dev Standar</b> |
|------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| SP1              | 77       | 1.00           | 5.00            | 3.909       | 4.00          | 0.871              |
| SP2              | 77       | 1.00           | 5.00            | 3.844       | 4.00          | 0.838              |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator kontruk sanksi pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk semua indikator adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai median pada seluruh indikator adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungnya (Hartono, 2010).

#### 4.2.5 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap kepatuhan pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Pajak**

| Indikator | N  | Minimum | Maksimum | Mean  | Median | Dev Standar |
|-----------|----|---------|----------|-------|--------|-------------|
| KP1       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.065 | 4.000  | 0.762       |
| KP2       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.065 | 4.000  | 0.744       |
| KP3       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.104 | 4.000  | 0.695       |
| KP4       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.156 | 4.000  | 0.823       |
| KP5       | 77 | 1.000   | 5.000    | 4.182 | 4.000  | 0.734       |
| KP6       | 77 | 1.000   | 5.000    | 3.987 | 4.000  | 0.712       |
| KP7       | 77 | 1.000   | 5.000    | 3.922 | 4.000  | 0.908       |
| KP8       | 77 | 1.000   | 5.000    | 3.857 | 4.000  | 0.950       |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk kepatuhan pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk semua indikator adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai Median pada seluruh indikator adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010).

#### **4.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian**

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk menilai hubungan antara konstruk (Jogiyanto dan Abdillah, 2016). Model dalam penelitian ini terdiri dari lima konstruk, yaitu sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak.

##### **4.3.1 Uji Outer Model**

Uji *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari model yang digunakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan tahapan uji *outer model*:

##### **1. Validitas Konvergen**

Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas konvergen adalah nilai AVE (*Average Varians Extracted*) dan nilai *Communality* lebih dari 0,5 dan nilai

*outer loading* lebih dari 0,4 – 0,7 (Soilihin dan Ratmono, 2013). Berikut merupakan hasil uji validitas konvergen;

**Tabel 4.8**  
**Nilai *Outer Loadings***

| Konstruk | SK    | SP    | KP    |
|----------|-------|-------|-------|
| SK1      | 0.623 |       |       |
| SK2      | 0.610 |       |       |
| SK3      | 0.632 |       |       |
| SK4      | 0.858 |       |       |
| SK5      | 0.873 |       |       |
| SK6      | 0.774 |       |       |
| SP1      |       | 0.952 |       |
| SP2      |       | 0.935 |       |
| KP1      |       |       | 0.848 |
| KP2      |       |       | 0.867 |
| KP3      |       |       | 0.651 |
| KP4      |       |       | 0.684 |
| KP5      |       |       | 0.646 |
| KP6      |       |       | 0.753 |
| KP7      |       |       | 0.842 |
| KP8      |       |       | 0.857 |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 2

Keterangan: SK (Sosial Kemasyarakatan), SP (Sanksi Pajak), KP (Kepatuhan Pajak)

**Tabel 4.9**  
**Nilai AVE dan *Communality***

| Konstruk | AVE   | <i>Communality</i> |
|----------|-------|--------------------|
| SK       | 0.543 | 0.543              |
| SP       | 0.890 | 0.890              |
| KP       | 0.599 | 0.599              |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: SK (Sosial Kemasyarakatan), SP (Sanksi Pajak), KP (Kepatuhan Pajak)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai *outer loading*. Tabel tersebut terdapat 2 konstruk yang nilai *outer loading* kurang dari 0,7. Berdasarkan pendapat dari

Sholihin dan Ratmono (2013), peneliti dapat tidak menghapus nilai *outer loading* antara 0,4 – 0,7 jika indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *composite reliability* di atas nilai batasnya.

Tabel 4.9 menunjukkan nilai AVE dan *communality*. Tabel tersebut diketahui bahwa nilai AVE dan *communality* dari setiap konstruk diatas 0,5. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa indikator pada masing-masing konstruk sudah valid.

## 2. Validitas Diskriminan

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian valitas diskriminan. Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas diskriminan adalah nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* adalah lebih dari 0,7 dalam satu variabel (Jogiyanto dan Abdillah, 2016).

Nilai dari akar AVE dan korelasi variabel laten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten**

| Konstruk | Akar AVE | KP    | SK    | SP    |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| KP       | 0.774    | 1     | 0.845 | 0.84  |
| SK       | 0.737    | 0.845 | 1     | 0.786 |
| SP       | 0.943    | 0.840 | 0.786 | 1     |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 4

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai akar AVE lebih dari nilai korelasi variabel laten di setiap konstruk. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai setiap konstruk sudah valid. Hasil dari nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Nilai *Cross Loadings***

|     | <b>KP</b> | <b>SK</b> | <b>SP</b> |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| KP1 | 0.848     | 0.714     | 0.641     |
| KP2 | 0.867     | 0.682     | 0.709     |
| KP3 | 0.651     | 0.416     | 0.408     |
| KP4 | 0.684     | 0.483     | 0.453     |
| KP5 | 0.646     | 0.555     | 0.380     |
| KP6 | 0.753     | 0.617     | 0.521     |
| KP7 | 0.842     | 0.816     | 0.886     |
| KP8 | 0.857     | 0.794     | 0.918     |
| SK1 | 0.477     | 0.623     | 0.389     |
| SK2 | 0.337     | 0.610     | 0.240     |
| SK3 | 0.350     | 0.632     | 0.283     |
| SK4 | 0.750     | 0.858     | 0.747     |
| SK5 | 0.821     | 0.874     | 0.859     |
| SK6 | 0.741     | 0.774     | 0.620     |
| SP1 | 0.849     | 0.819     | 0.952     |
| SP2 | 0.729     | 0.652     | 0.935     |

Keterangan: SK (Sosial Kemasyarakatan), SP (Sanksi Pajak), KP (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* adalah lebih dari 0,7 atau antara 0,4 – 0,7. Berdasarkan dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji validitas diskriminan.

### 3. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan dua parameter, yaitu nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 2016). Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability***

| Konstruk | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>Composite Reliability</i> |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| SK       | 0.839                   | 0.874                        |
| SP       | 0.877                   | 0.942                        |
| KP       | 0.904                   | 0.922                        |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: SK (Sosial Kemasyarakatan), SP (Sanksi Pajak), KP (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7. Hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran yang dilakukan adalah reliabel.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari ketiga pengujian yang telah dilakukan (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas), menunjukkan konstruk dan indikator dalam penelitian ini valid dan reliabel, karena telah memenuhi syarat validitas konvergen, diskriminan dan reliabilitas.

#### **4.3.2 Uji Inner Model**

Setelah melakukan uji *outer model*, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah uji inner model. Terdapat dua parameter pengukuran yang digunakan dalam uji *inner model*, yaitu nilai  $R^2$  dan *path coefficient*.

##### **1. Nilai $R^2$**

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  juga digunakan untuk mengukur persentasi variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai  $R^2$  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Nilai  $R^2$**

| Konstruk | $R^2$ |
|----------|-------|
| KP       | 0.799 |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: KP (Kepatuhan Pajak)

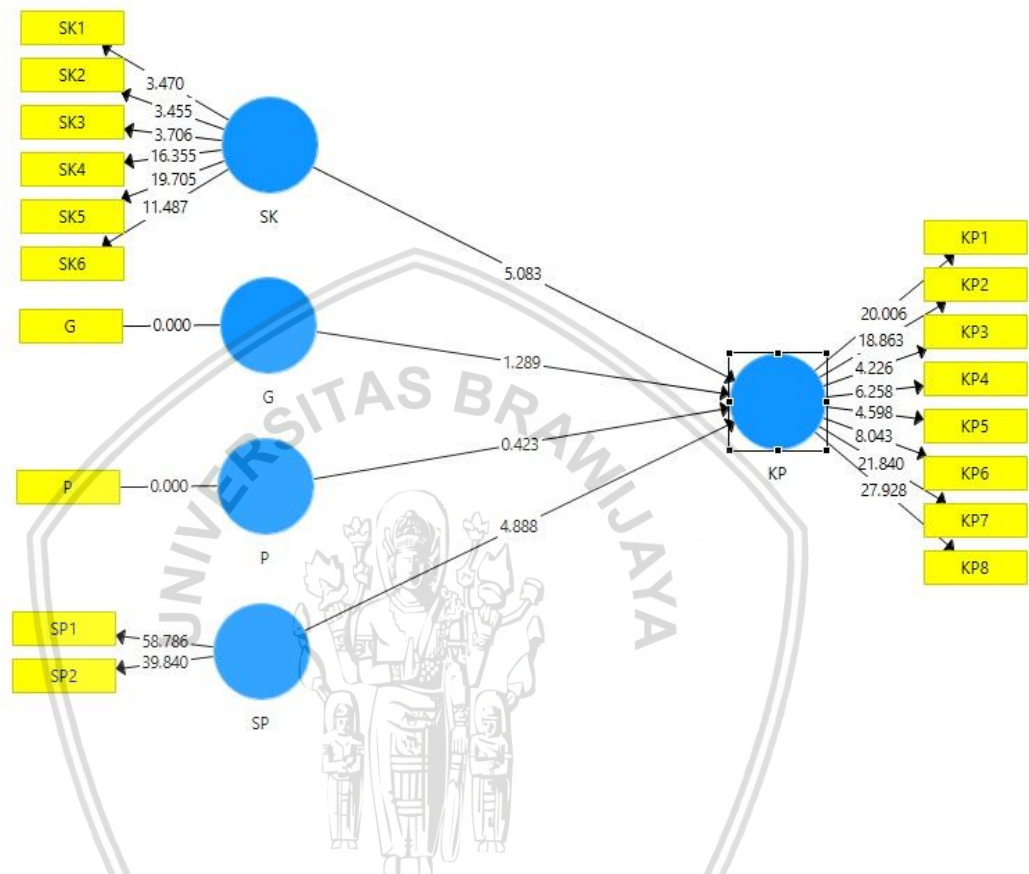
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  konstruk kepatuhan pajak adalah sebesar 0,799. Artinya persentase varians kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak sebesar 79%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## 2. Nilai *Path Coefficient*

Nilai *path coefficient* menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Apabila nilai *path coefficient* yang ditunjukkan nilai *T-statistics* > 1,64, maka hipotesis penelitian ( $H_a$ ) diterima. Namun apabila nilai *T-statistics* < 1,64, maka hipotesis penelitian ( $H_a$ ) ditolak. Dengan menggunakan PLS Bootstrapping maka dapat dilihat model struktural dan nilai *T-statistics* sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Model Struktural**



**Tabel 4.14**  
**Nilai Path Coefficient**

| Hipotesis | Konstruk | Original Sampel | T-statistics | Keputusan |
|-----------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| <b>H1</b> | SK -> KP | 0.465           | 5.083        | Diterima  |
| <b>H2</b> | G -> KP  | 0.061           | 1.289        | Ditolak   |
| <b>H3</b> | P -> KP  | 0.025           | 0.423        | Ditolak   |
| <b>H4</b> | SP -> KP | 0.463           | 4.888        | Diterima  |

Sumber: Lampiran 2 Tabel 5

Keterangan: SK (Sosial Kemasyarakatan), G (Gender), P (Pendidikan), SP (Sanksi Pajak), KP (Kepatuhan Pajak)

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak diterima atau berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan untuk gender dan tingkat pendidikan mendapatkan hasil ditolak atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berikut adalah penjelasannya:

##### 1. Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk sosial kemasyarakatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta ( $\beta$ ) positif, yaitu sebesar 0,465 dan nilai *T-statistics* dari variabel sosial kemasyarakatan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 5,083 atau  $>1,64$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa **Hipotesis 1 diterima**.

##### 2. Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta ( $\beta$ ) positif, yaitu sebesar 0,061 dan nilai *T-statistics* dari variabel gender terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 1.289 atau  $< 1,96$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa **Hipotesis 2 ditolak**.

### 3. Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta ( $\beta$ ) positif, yaitu sebesar 0,025 dan nilai *T-statistics* dari variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0.423 atau  $< 1,64$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa **Hipotesis 3 ditolak**.

### 4. Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta ( $\beta$ ) positif, yaitu sebesar 0,463 dan nilai *T-statistics* dari konstruk sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 4.888 atau  $> 1,64$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa **Hipotesis 4 diterima**.

## 4.5 Hasil Analisis Sensitivitas (*Sensitivity Analysis*)

Analisis sensitivitas digunakan untuk pengecekan perubahan variabel dependen terhadap variabel independen. Pada penelitian ini akan menguji sensitivitas gender dan tingkat pendidikan. Dengan menggunakan SPSS maka dapat dilihat tabel analisis sensitivitas gender dengan menggunakan *independent sample test* sebagai berikut;

**Gambar 4.2**  
**Analisis Sensitivitas Gender**

### Group Statistics

|    | Gender | N  | Mean    | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|----|--------|----|---------|----------------|-----------------|
| KP | 1.00   | 32 | 31.0000 | 6.13294        | 1.08416         |
|    | 2.00   | 45 | 33.2889 | 3.67190        | .54737          |

### Independent Samples Test

|    |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |        |                 |                 |                       |   |         |
|----|-----------------------------|---|------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|---------|
|    |                             | F                                       | Sig. | t                            | df     | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |         |
|    |                             |   |      |                              |        |                 |                 |                       | Lower                                     | Upper   |
| KP | Equal variances assumed     | 1.451                                   | .232 | -2.044                       | 75     | .044            | -2.28889        | 1.11994               | -4.51993                                  | -.05784 |
|    | Equal variances not assumed |   |      | -1.885                       | 46.681 | .066            | -2.28889        | 1.21450               | -4.73260                                  | .15482  |

Pada output pertama yaitu group statistics, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah data sebanyak 32 untuk gender laki-laki dan 45 untuk gender perempuan. Tingkat kepatuhan rata-rata gender laki laki terhadap kepatuhan pajak sebesar 31, dan tingkat kepatuhan rata-rata gender perempuan terhadap kepatuhan pajak sebesar 32,29. Standar deviasi untuk gender laki-laki lebih besar daripada gender perempuan. Standar eror mean untuk gender laki-laki dan perempuan sebesar 1,08 dan 0,55.

Pada output kedua yaitu independent sample test, dapat diinterpretasikan bahwa nilai  $F = 1.451$  ( $\text{sig} = 0,232$ ) karena  $\text{sig}$  diatas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kepatuhan laki-laki dan perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini bersifat homogen. Selanjutnya,  $t$  hitung sebesar  $-2.004$  ( $\text{sig} < 0,05$ ), artinya tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan pajak

antara laki-laki dan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gender laki-laki dan perempuan terhadap kepatuhanw ajib pajak.

Selanjutnya dengan menggunakan SPSS maka dapat dilihat table analisis sensitivitas tingkat pendidikan sebagai berikut;

**Gambar 4.3**  
**Analisis Sensitivitas Tingkat Pendidikan**

| Ranks |         |    |           |
|-------|---------|----|-----------|
| TP    |         | N  | Mean Rank |
| KP    | SMA     | 18 | 28.78     |
|       | Diploma | 25 | 41.66     |
|       | S1      | 31 | 41.47     |
|       | S2      | 3  | 52.67     |
|       | Total   | 77 |           |

| Test Statistics <sup>a,b</sup> |       |
|--------------------------------|-------|
| KP                             |       |
| Chi-Square                     | 5.693 |
| df                             | 3     |
| Asymp. Sig.                    | .128  |

a. Kruskal Wallis Test  
b. Grouping Variable: TP

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa terlihat tingkat kepatuhan rata-rata dari masing-masing tingkat pendidikan. Kelompok SMA memiliki tingkat rata-rata kepatuhan paling rendah, kemudian tingkat pendidikan S1, tingkat pendidikan Diploma, dan tingkat pendidikan S2 memiliki rata-rata kepatuhan paling tinggi.

Pada Test Statistics dapat dilihat nilai sebesar sig. 0,128 karena sig  $>0,005$  maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antar keempat tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya nilai Chi-Square pada gambar diatas sebesar 5,693 yang artinya nilai perbedaan keempat tingkat pendidikan tersebut sangat rendah. Semakin besar nilai Chi-Square maka menunjukkan semakin besar perbedaan antar tingkat kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkatan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM, dengan variabel sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM. Namun dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Berikut uraian diskusi hasil pengujian hipotesis:

##### **4.6.1 Pengaruh Sosial Kemasyarakatan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel sosial kemasyarakatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Torgler (2003), Khaerunnisa & Wiratno (2014), dan Muthia (2013) yang menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya

responden yang memiliki sosial kemasyarakatan yang tinggi akan memiliki moral pajak yang tinggi dan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan di kota Malang dipengaruhi oleh faktor sosial kemasyarakatan. Wajib pajak di Kota Malang yang memiliki faktor sosial kemasyarakatan yang tinggi maka akan semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya, kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang dipengaruhi secara langsung oleh variabel sosial kemasyarakatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sikap kepatuhan wajib pajak sudah berasal dari motivasi dalam diri wajib pajak (intrinsik) baik yang timbul karena kewajiban moral maupun keyakinan berkontribusi kepada negara melalui pajak dengan patuh terhadap kepatuhan perpajakan yang berlaku.

#### **4.6.2 Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis 2 menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017), Cahyonowati (2011) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) yang menyatakan bahwa gender merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan analisis sensitivitas *independent sample test* yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara kepatuhan laki-laki dan



perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gender laki-laki dan perempuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang tidak dipengaruhi oleh gender. Kondisi ini mencerminkan bahwa jenis kelamin wajib pajak tidak mempengaruhi patuhnya wajib pajak, karena pria atau wanita yang memiliki penghasilan maka mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

#### **4.6.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis 3 menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amilin dan Yusronillah (2009) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017), Freddy (2014), dan Fitriyani, Prasetyo, Yustien, & Hizazi (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan analisis sensitivitas kruskal wallis sample test yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antar keempat tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya nilai Chi-Square pada analisis tersebut sebesar 5,693 yang artinya nilai perbedaan keempat tingkat pendidikan tersebut sangat rendah. Semakin besar nilai Chi-Square maka menunjukkan semakin besar

perbedaan antar tingkat kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkatan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

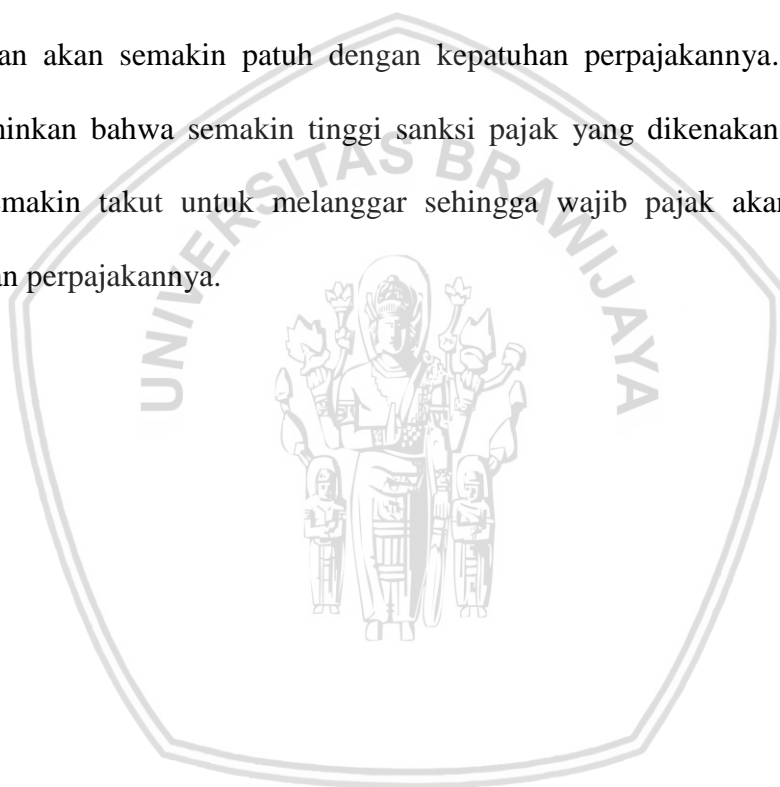
Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Kurangnya sosialisasi yang merata merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Pengetahuan yang tidak merata tersebut menyebabkan masyarakat memiliki tingkat nasionalisme dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang berbeda-beda. Misalnya saja jika individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakan, namun individu tersebut tidak memiliki nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah maka individu tersebut cenderung untuk tidak membayar pajak. Sebaliknya jika individu yang berpendidikan rendah namun individu tersebut memiliki nasionalisme yang tinggi, maka individu tersebut akan cenderung membayar pajak. Kondisi ini mencerminkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang telah di capai oleh wajib pajak tidak menjamin wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

#### **4.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2017), Septarini (2015), & Pranata dan Setiawan (2015), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 2016:62). Artinya, responden yang memahami mengenai sanksi perpajakan akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Konstruk Yang Membentuk Kepatuhan Perpajakan.....                     | 22 |
| Tabel 2.2 Konstruk Yang Membentuk Sosial Kemasyarakatan .....                   | 25 |
| Tabel 2.3 Sanksi Administrasi Berupa Denda .....                                | 28 |
| Tabel 2.4 Konstruk Yang Membentuk Sanksi Pajak .....                            | 31 |
| Tabel 3.1 Parameter Pengukuran <i>Outer Model</i> .....                         | 47 |
| Tabel 3.2 Nilai <i>Outer Loadings</i> .....                                     | 49 |
| Tabel 3.3 Nilai AVE dan <i>Communality</i> .....                                | 49 |
| Tabel 3.4 Nilai Akar AVE dan korelasi variabel laten .....                      | 50 |
| Tabel 3.5 Nilai <i>Cross Loading</i> .....                                      | 51 |
| Tabel 3.6 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....  | 52 |
| Tabel 4.1 Pembagian Pengembalian Kuesioner .....                                | 53 |
| Tabel 4.2 Deskriptif Responden.....   | 54 |
| Tabel 4.3 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Sosial Kemasyarakatan .....      | 55 |
| Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Gender .....                     | 56 |
| Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Tingkat Pendidikan .....         | 57 |
| Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Sanksi Pajak .....               | 57 |
| Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Pajak .....            | 58 |
| Tabel 4.8 Nilai <i>Outer Loadings</i> .....                                     | 60 |
| Tabel 4.9 Nilai AVE dan <i>Communality</i> .....                                | 60 |
| Tabel 4.10 Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten .....                     | 61 |
| Tabel 4.11 Nilai <i>CrossLoading</i> .....                                      | 62 |
| Tabel 4.12 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> ..... | 63 |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.13 Nilai $R^2$ .....                   | 64 |
| Tabel 4.14 Nilai <i>Path Coefficient</i> ..... | 65 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....          | 33 |
| 4.1 Model Struktural .....                        | 65 |
| 4.2 Analisis Sensitivitas Gender .....            | 68 |
| 4.2 Anaisis Sensitivitas Tingkat Pendidikan ..... | 69 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Lampiran Kuesioner.....              | 82 |
| Lampiran Tabel Hasil Kuesioner ..... | 85 |





## DAFTAR PUSTAKA

- Amilin & Yusronillah F. (2009). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *JMK* Vol 7 No 3, 28-43
- Ananti, Ridha. (2018). *Pemerintah Terus Dorong Kepatuhan Pajak UMKM*. Online: [www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id). Diakses pada 1 Februari 2018
- Anonim. (2017). *Data APBN*. Online: <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>. Diakses pada 8 Desember 2017
- Anonim. (2017). *Penduduk Indonesia Menurut Desa Hasil Sensus Penduduk 2010*. Online: <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 8 Desember 2017
- Anonim. (2018). *Data UMKM*. Online: <http://dinkop.malangkota.go.id/>. Diakses pada 1 Februari 2018
- Aryati, Titik (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 25 No1, 13-29
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 136-153
- Cahyonowati, Nur (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, Vol 15 No 2, 161-177
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Selemba Empat
- Feld, Lars P. & Benno Torgler. (2007). Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA)*. Working Paper No.2007-03.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, Vol 10 No 2, 115-122
- Franzoni, Luigi Alberto. (1999). Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*. Contents No. 6020: 52-94.

- Freddy, Daulat. (2014). Pengaruh Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2, 49-60
- Handayani dan Sugiarti. (2006). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. Pusat Studi wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang
- Hartono, J. & Abdillah, W. (2016). *Partial Least Square: Alternatif Structural Equation Modeling dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hartono, Jogiyo (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kakunsi, E, Pangemanan, S, & Pontoh, W (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12 No 2, 391-400
- Khaerunnisa, Indar & Wiratno Adi (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP* Vol. 1 No. 2, hal 211-224
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 2, 1-15
- Mufidah. 2003. *Paradigma Gender*. Malang : Bayumedia Publishing
- Muthia, F., A. (2013). Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 4 No 1, 1–10.
- Nurmanto, S. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta . Ind-Hill-Co.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Pranata, P. A, & Setiawan, P. E (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10 No 2, 456-473
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, Vol VI No 1, 29-43
- Siregar, D. L (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, 119-128
- Sofian, Effendi & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, M. & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Non-Linier dalam Penelitian Sosial dan Bismis*. Yogyakarta: Andi.
- Subandi, H. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). Tesis Universitas Airlangga.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *Dissertation*. Basel University
- Torgler, Benno & Christoph A. Schaltegger. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA)*. Working Paper No.2005-30.
- Torgler, Benno, & Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Undang –Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widodo, Widi, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

# LAMPIRAN



## Lampiran 1

### KUESIONER PENELITIAN

Yang terhormat:

Bapak/Ibu/Saudara/ (i) Wajib Pajak

di Kota Malang.

Dalam rangka penyusunan kuesioner untuk penelitian skripsi saya yang mengangkat topik perpajakan, dengan judul penelitian: **Pengaruh Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM di Kota Malang)**. Sesuai dengan judul penelitian tersebut, responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kota Malang. Untuk mendukung penelitian ini, Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara/ (i) berkenan untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini.

Bapak/ Ibu/ Saudara/ (i) Saya mohon untuk memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) atau menambahkan pada tempat yang telah disediakan atas pertanyaan-pertanyaan. Hasil kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, yaitu penyusunan SKRIPSI. Oleh karena itu, kejujuran dalam pengisian kuesioner ini sangat kami harapkan. Kami menjamin kerahasiaan dari jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ (i) dalam kuesioner ini sesuai dengan etika penelitian dan penelitian ini TIDAK ADA kaitannya dengan pihak Dirjen Pajak.

Bantuan dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ (i) sangat berarti untuk penelitian Skripsi ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dika Putri Handayani

**NIM: 145020301111017**

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Usia Responden : ..... Tahun
2. Status Pernikahan : Nikah / Lajang / Duda / Janda \*)
3. Pekerjaan : Wirausaha / Non Wirausaha \*)
4. Hasil omzet dalam setahun \*) : a.  $\leq$  Rp 300.000.000  
b. Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000  
c. Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000
5. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengisi SPT : Pernah / Tidak Pernah \*)

\*) **Lingkari Jawaban Anda**

### B. KUESIONER PENELITIAN

#### Petunjuk Pengisian

Lingkarilah (O) jawaban anda pada pilihan yang tersedia untuk masing-masing jawaban pertanyaan/ pernyataan kuesioner. Tiap pertanyaan/ pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

1. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki  
2. Perempuan
2. Pendidikan Terakhir : 1. SMA  
2. Diploma  
3. S1  
4. S2

Berilah tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia untuk masing-masing jawaban pertanyaan/ pernyataan kuesioner. Tiap pertanyaan/ pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan/ pertanyaan **3- 18** adalah sebagai berikut:

| Sangat Tidak Setuju (STS) | Tidak Setuju (TS) | Netral (N) | Setuju (S) | Sangat Setuju (SS) |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
|---------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|

| NO | Uraian   | STS | TS | N | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 3  | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap lembaga peradilan di Indonesia dalam memutuskan dengan tepat dan benar kasus-kasus perpajakan yang ada |     |    |   |   |    |
| 4  | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan saya   |     |    |   |   |    |



|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    | mudah dalam memperoleh informasi perpajakan  |  |  |  |  |  |
| 5  | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan tarif pajak yang berlaku   |  |  |  |  |  |
| 6  | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kemudahan proses pelaporan dan pembayaran  |  |  |  |  |  |
| 7  | Saya membayar pajak karena kebanggaan saya sebagai warga negara Indonesia  |  |  |  |  |  |
| 8  | Saya membayar pajak karena ketaatan saya dalam beragama  |  |  |  |  |  |
| 9  | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan adanya sanksi administrasi pajak yang dikenakan bagi pelanggar   |  |  |  |  |  |
| 10 | Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat   |  |  |  |  |  |
| 11 | Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut |  |  |  |  |  |
| 12 | Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa yang terlambat tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya   |  |  |  |  |  |
| 13 | Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir  |  |  |  |  |  |
| 14 | Saya selalu tepat waktu dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir   |  |  |  |  |  |
| 15 | Saya tepat waktu dalam membayar dan melaporkan jenis pajak tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak   |  |  |  |  |  |
| 16 | Saya selalu membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan  |  |  |  |  |  |
| 17 | Saya selalu tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak  |  |  |  |  |  |
| 18 | Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan   |  |  |  |  |  |



## Lampiran 2

**Tabel 1**  
**Jawaban Responden**

| Indikator | N  | Minimum | Maksimum | Mean  | Median | Dev Standar |
|-----------|----|---------|----------|-------|--------|-------------|
| SK1       | 77 | 3       | 5        | 4.208 | 4      | 0.518       |
| SK2       | 77 | 2       | 5        | 4.091 | 4      | 0.628       |
| SK3       | 77 | 2       | 5        | 3.909 | 4      | 0.809       |
| SK4       | 77 | 1       | 5        | 3.792 | 4      | 0.827       |
| SK5       | 77 | 1       | 5        | 3.909 | 4      | 0.871       |
| SK6       | 77 | 1       | 5        | 4.143 | 4      | 0.833       |
| G1        | 77 | 1       | 2        | 1.584 | 2      | 0.49        |
| P1        | 77 | 1       | 4        | 2.247 | 2      | 0.855       |
| SP1       | 77 | 1       | 5        | 3.909 | 4      | 0.871       |
| SP2       | 77 | 1       | 5        | 3.844 | 4      | 0.838       |

**Tabel 2**  
**Outer Loading**

| Konstruk | SK    | D     | P     | SP    | KP    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SK1      | 0.624 |       |       |       |       |
| SK2      | 0.610 |       |       |       |       |
| SK3      | 0.633 |       |       |       |       |
| SK4      | 0.857 |       |       |       |       |
| SK5      | 0.873 |       |       |       |       |
| SK6      | 0.744 |       |       |       |       |
| G1       |       | 0.763 |       |       |       |
| P1       |       |       | 0.917 |       |       |
| SP1      |       |       |       | 0.952 |       |
| SP2      |       |       |       | 0.935 |       |
| KP1      |       |       |       |       | 0.849 |
| KP2      |       |       |       |       | 0.867 |
| KP3      |       |       |       |       | 0.649 |
| KP4      |       |       |       |       | 0.684 |
| KP5      |       |       |       |       | 0.647 |
| KP6      |       |       |       |       | 0.754 |
| KP7      |       |       |       |       | 0.842 |
| KP8      |       |       |       |       | 0.857 |

**Tabel 3**  
**Quality Criteria-Over View**

| Konstruk | AVE    | Composite Reliability | R Square | Cronbachs Alpha | Communality | Redundancy |
|----------|--------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|------------|
| G        | 1      | 1                     | 0        | 1               | 1           | 0          |
| KP       | 0.5991 | 0.9218                | 0.799    | 0.9042          | 0.5991      | 0.0145     |
| P        | 1      | 1                     | 0        | 1               | 1           | 0          |
| SK       | 0.5429 | 0.8744                | 0        | 0.839           | 0.5429      | 0          |
| SP       | 0.89   | 0.9418                | 0        | 0.8772          | 0.89        | 0          |

**Tabel 4**  
**Latent Variabel Correlation**

| Konstruk | Akar AVE | G     | KP    | P | SK    | SP    |
|----------|----------|-------|-------|---|-------|-------|
| G        | 1.000    | 1     | 0.198 |   | 0.295 | 0.264 |
| KP       | 0.774    | 0.198 | 1     |   | 0.846 | 0.839 |
| P        | 1.000    |       |       | 1 |       |       |
| SK       | 0.737    | 0.295 | 0.846 |   | 1     | 0.786 |
| SP       | 0.943    | 0.264 | 0.839 |   | 0.786 | 1     |

**Tabel 5**  
**Path Coefficient**

| Konstruk | <i>Original Sampel</i> | <i>T-statistics</i> | Keputusan |
|----------|------------------------|---------------------|-----------|
| SK → KP  | 0.465                  | 5.083               | Diterima  |
| G → KP   | 0.061                  | 1.289               | Ditolak   |
| P → KP   | 0.025                  | 0.423               | Ditolak   |
| SP → KP  | 0.463                  | 4.888               | Diterima  |